

## **ETIKA BERMEDIA SOSIAL BAGI APARATUR PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Alfiatur Rohmah<sup>1</sup>, Muyaasaroh<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,  
Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi : [alfiaturrohmah2007@gmail.com](mailto:alfiaturrohmah2007@gmail.com) <sup>2</sup>[fmmp08@gmail.com](mailto:fmmp08@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Transformasi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam pola komunikasi pemerintah, khususnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi publik dan interaksi dengan masyarakat. Namun, penggunaan media sosial oleh aparatur pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan etika, seperti penyebaran informasi yang belum terverifikasi, penggunaan bahasa yang kurang tepat, serta rendahnya kesadaran akan tanggung jawab komunikasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah dalam perspektif Islam serta mengidentifikasi penerapannya dalam praktik komunikasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Data dianalisis menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bermedia sosial oleh aparatur pemerintah belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek kejujuran, tanggung jawab, kesopanan, dan verifikasi informasi. Meskipun demikian, terdapat praktik komunikasi yang telah mencerminkan nilai-nilai etika Islam secara positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai etika Islam dalam komunikasi digital sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.*

**Kata Kunci:** etika komunikasi; media sosial; aparatur pemerintah; perspektif Islam; komunikasi digital

### **ABSTRACT**

*Digital transformation has significantly changed government communication patterns, particularly through the use of social media as a medium for public information dissemination and interaction with society. However, the use of social media by government officials still faces various ethical issues, such as the spread of unverified information, inappropriate language use, and a lack of awareness regarding responsibility in digital communication. This study aims to analyze social media ethics among government officials from an Islamic perspective and to identify its implementation in digital communication practices. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques through documentation and literature study. The data were analyzed using an interactive model involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of social media ethics among government officials is not yet optimal, particularly in aspects of honesty, responsibility, politeness, and information verification. Nevertheless, there are positive communication practices that reflect Islamic ethical values. This study concludes that the integration of Islamic ethical values in digital communication is essential to create responsible, integrity-based communication and to enhance public trust in government institutions.*

**Keywords:** communication ethics; social media; government officials; Islamic perspective; digital communication

## **PENDAHULUAN**

Transformasi digital yang berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola komunikasi dan interaksi sosial. Kehadiran internet dan media sosial telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan pertukaran informasi berlangsung secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis. Media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga telah menjadi instrumen penting dalam komunikasi institusional. Dalam konteks pemerintahan modern, media sosial digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta membangun hubungan yang lebih interaktif antara pemerintah dan publik (Nasrullah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan yang tidak sederhana, khususnya terkait dengan aspek etika komunikasi. Fenomena penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (hoaks), ujaran kebencian, pelanggaran norma kesopanan, serta konflik yang dipicu oleh konten digital menjadi permasalahan yang semakin sering terjadi di ruang publik digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesadaran etika dalam penggunaannya. Bagi aparatur pemerintah, permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena mereka tidak hanya berperan sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi institusi negara yang setiap tindakannya dapat memengaruhi citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Rahman, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman terhadap etika bermedia sosial menjadi faktor utama terjadinya berbagai pelanggaran dalam komunikasi digital. Menurut Sari dan Hidayat (2024), aparatur pemerintah seringkali menghadapi dilema antara kebebasan berekspresi sebagai individu dengan tanggung jawab profesional sebagai bagian dari institusi negara. Di sisi lain, penelitian oleh Putri (2022) menegaskan bahwa komunikasi digital yang tidak etis dapat berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknis dan sosial komunikasi digital, serta belum secara mendalam mengintegrasikan perspektif nilai-nilai agama sebagai landasan etika. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.'

Dalam perspektif Islam, etika komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran moral dan akhlak. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (ṣidq), tanggung jawab (amanah), keadilan, kesopanan (adab),

serta kewajiban melakukan verifikasi informasi (tabayyun) menjadi dasar dalam menjaga kualitas komunikasi (Anfa, 2022). Al-Qur'an dan hadis juga menekankan pentingnya menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, menghindari fitnah, serta tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Dalam konteks media sosial, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk diterapkan sebagai pedoman dalam memproduksi dan menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat luas.

Perkembangan media sosial yang semakin cepat menuntut adanya integrasi antara nilai-nilai agama dengan praktik komunikasi digital. Etika bermedia sosial dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai solusi dalam menghadapi berbagai tantangan moral di era digital. Aparatur pemerintah sebagai aktor utama dalam komunikasi publik memiliki tanggung jawab untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam setiap aktivitas komunikasinya. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan orientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah dalam perspektif Islam serta bagaimana implementasinya dalam praktik komunikasi digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip etika bermedia sosial berdasarkan nilai-nilai Islam dan merumuskan penerapannya bagi aparatur pemerintah dalam rangka menciptakan komunikasi yang bertanggung jawab, beretika, dan profesional. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya kajian tentang etika komunikasi digital berbasis nilai-nilai Islam, sementara secara praktis dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menggunakan media sosial secara bijak, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga harmoni sosial di era digital.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah dalam perspektif Islam, khususnya dalam konteks komunikasi digital yang terus berkembang. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, interpretasi, serta proses sosial yang terjadi dalam suatu fenomena, sehingga sangat relevan digunakan untuk mengkaji nilai-nilai etika dan penerapannya dalam praktik komunikasi digital (Creswell, 2014). Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai praktik etika bermedia sosial yang dilakukan oleh aparatur pemerintah serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.'

Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks ruang digital, khususnya pada platform media sosial yang digunakan oleh aparaturnya pemerintah seperti Instagram, Facebook, dan Twitter (X). Pemilihan ruang digital sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik komunikasi modern yang tidak lagi terbatas secara geografis, melainkan berlangsung secara daring dan terbuka. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2026. Rentang waktu tersebut dipilih agar peneliti memiliki cukup kesempatan untuk mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data secara mendalam dan berkelanjutan.

Subjek penelitian ini adalah aparaturnya pemerintah yang aktif menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi publik, baik melalui akun resmi instansi maupun akun pribadi yang digunakan untuk menyampaikan informasi publik. Kriteria pemilihan subjek meliputi: (1) memiliki akun media sosial aktif, (2) secara rutin mempublikasikan konten yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan, serta (3) memiliki interaksi dengan masyarakat melalui media sosial. Sementara itu, objek penelitian adalah konten komunikasi digital yang dihasilkan oleh aparaturnya pemerintah, seperti unggahan (postingan), komentar, caption, serta bentuk interaksi lainnya yang mencerminkan praktik etika bermedia sosial.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengarsipkan berbagai konten media sosial yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi teks, gambar, maupun tanggapan (komentar) yang mencerminkan pola komunikasi digital aparaturnya pemerintah. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan etika komunikasi, literasi digital, dan perspektif Islam. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji data penelitian.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (human instrument), yang berperan secara langsung dalam seluruh proses penelitian, mulai dari penentuan fokus, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Untuk membantu proses pengumpulan dan analisis data, peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman dokumentasi dan lembar analisis. Lembar analisis tersebut disusun berdasarkan indikator etika komunikasi dalam perspektif Islam, antara lain: (1) kejujuran (ṣidq), (2) tanggung jawab (amanah), (3) kesopanan (adab), (4) keadilan, serta (5) prinsip verifikasi informasi (tabayyun). Indikator ini digunakan sebagai acuan dalam mengkategorikan dan menilai konten komunikasi digital yang dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), yang meliputi

tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, serta menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, sehingga diperoleh temuan yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai akun media sosial aparatur pemerintah serta sumber literatur yang relevan. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang (cross-check) terhadap data yang telah dianalisis untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil penelitian. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, serta validitas data penelitian (Sugiyono, 2019).

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap perencanaan, yang meliputi identifikasi masalah, penentuan fokus penelitian, serta penyusunan instrumen penelitian. Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Tahap ketiga adalah tahap analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data. Tahap keempat adalah tahap penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian secara sistematis. Dengan prosedur yang jelas dan terstruktur ini, penelitian diharapkan dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks yang serupa.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh aparatur pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi publik dan membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap konten media sosial yang dikaji, ditemukan bahwa sebagian besar aparatur pemerintah telah memanfaatkan media sosial secara aktif untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan, program kerja, serta kegiatan pemerintahan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik melalui media digital. Temuan ini sejalan dengan pendapat Nasrullah (2020) yang menyatakan bahwa media sosial telah menjadi instrumen penting dalam komunikasi publik modern yang bersifat interaktif dan partisipatif.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan etika dalam penggunaan media sosial oleh aparatur

pemerintah. Beberapa bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain penggunaan bahasa yang kurang tepat, penyampaian informasi yang belum terverifikasi secara menyeluruh, serta respons yang kurang profesional terhadap komentar masyarakat. Dalam beberapa kasus, ditemukan pula adanya kecenderungan penggunaan media sosial untuk kepentingan pribadi yang tidak relevan dengan fungsi sebagai aparatur negara. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran etika yang memadai. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2023) yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital dan etika komunikasi menjadi salah satu faktor utama munculnya permasalahan dalam komunikasi digital di kalangan aparatur pemerintah.

Berdasarkan analisis menggunakan indikator etika komunikasi dalam perspektif Islam, ditemukan bahwa prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan tanggung jawab (*amanah*) belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Misalnya, dalam beberapa unggahan ditemukan informasi yang bersifat parsial atau kurang lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Selain itu, prinsip *tabayyun* atau verifikasi informasi juga belum optimal diterapkan, yang terlihat dari adanya konten yang dibagikan tanpa sumber yang jelas. Padahal, dalam ajaran Islam, verifikasi informasi merupakan kewajiban moral untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar (Anfa, 2022).

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya praktik komunikasi yang sudah sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, seperti penggunaan bahasa yang sopan, penyampaian informasi yang edukatif, serta respons yang konstruktif terhadap kritik masyarakat. Praktik-praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip *adab* dalam komunikasi, yang menekankan pentingnya menjaga kesantunan dan menghormati orang lain. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kekurangan, terdapat pula upaya positif dalam menerapkan etika bermedia sosial di kalangan aparatur pemerintah.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan sekaligus perbedaan. Penelitian Suryadi (2019) menemukan bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah cenderung bersifat satu arah dan kurang interaktif, sementara dalam penelitian ini ditemukan adanya peningkatan interaksi antara aparatur pemerintah dan masyarakat melalui fitur komentar dan tanggapan. Namun, seperti yang ditemukan oleh Rahman (2020), permasalahan etika masih menjadi tantangan utama dalam komunikasi digital pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya sekaligus menunjukkan adanya perkembangan dalam pola komunikasi digital yang lebih interaktif, meskipun belum sepenuhnya diiringi dengan penerapan etika yang optimal.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara teknologi komunikasi dan nilai-nilai etika, khususnya dalam perspektif Islam, merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Etika bermedia sosial dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka praktis dalam

mengarahkan perilaku komunikasi di ruang digital. Hal ini memperkuat pandangan bahwa nilai-nilai agama memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan moral di era digital (Creswell, 2014).

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi aparatur pemerintah dalam meningkatkan kualitas komunikasi digital. Aparatur pemerintah perlu meningkatkan literasi digital dan kesadaran etika dalam penggunaan media sosial, serta menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan dalam setiap aktivitas komunikasinya. Selain itu, diperlukan adanya pedoman atau regulasi yang lebih jelas terkait etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah guna meminimalkan potensi pelanggaran etika yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah dalam perspektif Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan komunikasi digital yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Meskipun telah terdapat praktik yang baik, masih diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan penerapan etika tersebut dalam kehidupan digital.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika bermedia sosial bagi aparatur pemerintah dalam perspektif Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk komunikasi digital yang bertanggung jawab dan berintegritas. Pemanfaatan media sosial oleh aparatur pemerintah telah menunjukkan fungsi yang strategis dalam menyampaikan informasi publik, meningkatkan transparansi, serta membangun interaksi dengan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan etika, seperti kurangnya verifikasi informasi, penggunaan bahasa yang kurang tepat, serta respons yang belum sepenuhnya mencerminkan profesionalisme sebagai representasi institusi negara.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran (šidq), tanggung jawab (amanah), kesopanan (adab), serta prinsip verifikasi informasi (tabayyun) belum dilakukan secara optimal dan konsisten dalam praktik bermedia sosial. Meskipun demikian, terdapat pula indikasi positif berupa upaya sebagian aparatur pemerintah dalam menerapkan komunikasi yang santun, informatif, dan konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika Islam memiliki relevansi yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengarahkan perilaku komunikasi digital yang lebih baik.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian etika komunikasi digital dengan mengintegrasikan perspektif Islam sebagai landasan

nilai. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi aparaturnya pemerintah untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran etika dalam penggunaan media sosial, sehingga mampu membangun kepercayaan publik dan menciptakan komunikasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang terbatas pada analisis konten media sosial tanpa melibatkan wawancara langsung dengan aparaturnya pemerintah, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh faktor internal yang memengaruhi perilaku komunikasi digital. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif, serta memperluas objek penelitian agar memperoleh hasil yang lebih mendalam dan representatif.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada institusi pendidikan yang telah memberikan dukungan akademik serta fasilitas yang menunjang proses penyusunan penelitian ini. Dukungan tersebut sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian, mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan konstruktif selama proses penelitian berlangsung. Bimbingan tersebut memberikan kontribusi penting dalam penyempurnaan isi dan kualitas penelitian ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan penyediaan referensi ilmiah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan tersebut sangat berarti dalam memperkaya kajian serta memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dan pihak lain yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## **NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies**

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: [www.omahnurverse.com](http://www.omahnurverse.com)

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 307 – 315.

### **Daftar Pustaka**

- Ahman, F. (2020). Etika Komunikasi Digital dalam Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi*, 9(1), 34–45.
- Anfa. (2022). *Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam*. Jurnal Anfa, 5(2), 45–58.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Putri, A. (2022). Pengaruh Etika Komunikasi Digital terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Komunikasi Publik*, 10(1), 67–78.
- Rahman, F. (2023). Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial di Kalangan Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 120–134.
- Sari, D., & Hidayat, T. (2024). Dilema Etika Aparatur Pemerintah dalam Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 15–29.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. (2019). Komunikasi Pemerintah di Era Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 89–102.